

ABSTRACT

COMPARISON OF INHERITANCE DISTRIBUTION SYSTEM IN ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW IN INDONESIA

Miftahul Falah

Student ID Number 212374201006

Inheritance is a very important process because inheritance will be experienced by everyone. Inheritance issues concern property which, if not given in accordance with certain provisions, can cause disputes between heirs. This research aims to determine the comparison of the Islamic and Civil Inheritance Law Systems in Indonesia.

This type of research is Normative Juridical using a Qualitative approach to secondary data and primary data. Data that has been collected through library research and related supporting data will be analyzed to achieve clarity on the issues discussed and the results will be presented descriptively. Based on the research results, it shows that the heir system according to the Civil Code is regulated based on the order of heir groups and heirs in higher groups will cover the rights of heirs in lower groups. Emphasizes division based on hierarchical family relationships and protects the share of legal heirs. It aims to ensure justice and protect the rights of the nuclear family. Meanwhile, according to Islamic law, it is based on the Al-Qur'an, Hadith, and ijma' ulama and Islamic law emphasizes proportional justice with the distribution of inheritance portions that have been determined in the Al-Qur'an. The aim is to realize justice and balance with rules that have been determined in detail. This law guarantees the rights of each heir according to their position and limits the reduction of inheritance rights through gifts or wills.

The principle of BW Law/Civil Code is that heirs who have the right to inherit are determined by grouping groups that indicate a priority scale. Heirs have the opportunity to have 1). Receive in full. 2). Refuse, confirmed by a decision in the District Court. 3). Accept with conditions.

Replacement of heirs 1). The amount of inheritance rights for men and determination is the same. 2). Provides inheritance rights for illegitimate children who have been recognized as legitimate in their father's inheritance.

Islamic law/KHI principles 1). There is no classification of heirs. 2). There is no chance of rejecting inheritance. 3). There is a change in the position of heir. 4). Men inherit 2 parts while women have 1 part. 5). Illegitimate children only inherit from their mother

words: Comparison, inheritance law system

ABSTRAK

PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Miftahul Falah

NIM. 212374201006

Waris merupakan proses yang sangat penting karena hal kewarisan akan dialami oleh semua orang. Masalah waris menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan sesuai dengan ketentuan yang pasti dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Sistem Hukum Waris Islam dan Perdata di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan serta data pendukung yang terkait, akan dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewaris menurut KUH Perdata diatur berdasarkan urutan golongan ahli waris dan Ahli waris dalam golongan lebih tinggi akan menutup hak ahli waris dalam golongan lebih rendah. Menekankan pembagian berdasarkan hubungan keluarga yang hierarkis dan melindungi bagian ahli waris yang sah. Ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak keluarga inti. Sedangkan menurut hukum islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama dan Hukum Islam menekankan keadilan proporsional dengan pembagian bagian waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dengan aturan yang telah ditetapkan secara rinci. Hukum ini memberikan jaminan hak bagi setiap ahli waris sesuai kedudukannya serta membatasi pengurangan hak waris melalui hibah atau wasiat.

Hukum BW/KUH Perdata prinsipnya Ahli waris yang berhak mewaris ditentukan dengan pengelompokan golongan yang menunjukkan skala prioritas. Ahli waris ada kesempatan memiliki 1). Menerima secara penuh. 2). Menolak dengan dikuatkan dengan penetapan di Pengadilan Negeri. 3). Menerima dengan syarat.

Penggantian ahli waris 1). Besaran hak mewaris untuk laki-laki dan penetapan adalah sama. 2). Memberikan hak mewaris bagi anak luar kawin yang telah diakui sah terhadap harta peninggalan bapaknya.

Hukum islam/KHI prinsipnya 1). Tidak ada penggolongan ahli waris. 2). Tidak ada kesempatan menolak harta warisan. 3). Ada penggantian kedudukan

ahli waris. 4). Hak mewaris laki-laki 2 bagian sedangkan yang perempuan 1 bagian. 5). Anak haram hanya mendapatkan warisan dari si ibu.

Kata Kunci : *Perbandingan, Sistem hukum waris*

